



PANDANGAN SULUH INDONESIA DAN INDONESIA RAYA TERHADAP KEBIJAKAN KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II

Rizky Alfi Habibillah, Yani Kusmarni

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
ralfihabillah@gmail.com

To cite this article: Habibillah, R. A., & Kusmarni, Y. (2023). Pandangan suluh indonesia dan indonesia raya terhadap kebijakan kabinet ali sastroamidjojo ii. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(1), 61-72. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i1.24623>.

Abstract

This study discusses the views reviewed in the news published by Suluh Indonesia and Indonesia Raya newspapers. This research uses a historical method which consists of four steps of research: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This study also uses a multidisciplinary approach by taking the concept of newspapers, editorials, corner notes and caricatures in an effort to discuss the research themes raised. Based on the results of the study, the Suluh Indonesia and Indonesia Raya newspapers have different views in viewing Ali Sastroamidjojo II cabinet policy. The Suluh Indonesia newspaper always supported what Ali Sastroamidjojo did, this is because the Suluh Indonesia newspaper is a media organ of the Indonesian National Party, and Ali Sastroamidjojo is a member of the party. So when serving as Prime Minister Ali Sastroamidjojo apart from criticism of this newspaper. In contrast to the Indonesia Raya newspaper, this newspaper always criticizes the policies issued by the Ali Sastroamidjojo II Cabinet, this is because the Indonesia Raya newspaper is classified as an Independent Press which if a policy is not in accordance with the idealism of the Editor in Chief then the newspaper is not will stop criticizing. Moreover, this Independent newspaper has an impartial view of the press into any political power, avoids biased reporting and benefits one party and harms the other party.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pandangan yang ditinjau dari pemberitaan yang diterbitkan oleh surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya. Penelitian ini menggunakan metode historis yang terdiri dari empat langkah penelitian: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mengambil konsep surat kabar, tajuk rencana, catatan pojok dan karikatur dalam upaya membahas tema penelitian yang diangkat. Berdasarkan hasil dari penelitian, surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo II. Surat kabar Suluh Indonesia selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo, hal ini dikarenakan surat kabar Suluh Indonesia merupakan organ media dari Partai Nasional Indonesia, dan begitu pun Ali Sastroamidjojo merupakan anggota dari partai. Sehingga ketika menjabat sebagai Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo terlepas dari kritik surat kabar ini. Berbanding terbalik dengan surat kabar Indonesia Raya, surat kabar ini selalu mengkritik kebijakan yang diterbitkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II, hal ini disebabkan surat kabar Indonesia Raya tergolong kepada Pers Independen yang mana jika suatu kebijakan tidak sesuai dengan idealisme dari Pemimpin Redaksi maka surat kabar tersebut tidak akan berhenti mengkritik. Terlebih surat kabar Independen ini memiliki pandangan pers yang tidak memihak ke dalam suatu kekuatan politik manapun, menghindarkan diri dari pemberitaan yang berat sebelah dan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Article Info

Article History:
Received 12 Mei 2020
Revised 16 Jul 2022
Accepted 28 Jul 2022
Available online 28 Maret 2023

Keyword:

Indonesia Raya
Indonesia National Party
Liberal Democracy
Mochtar Lubis
Suluh Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia berganti sistem kedaulatan dan dibentuklah sistem kesatuan negara baru yaitu Republik Indonesia dengan dasar negara Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pergantian sistem kedaulatan dan dasar negara yang terjadi pada Indonesia mempengaruhi bentuk pemerintahannya. (Thoha, 2005). Negara Indonesia menganut suatu demokrasi yang disebut dengan masa Demokrasi Liberal dan sistem pemerintahannya adalah Parlemen. Dari tujuh kabinet pernah menjabat pada masa Demokrasi Parlemen, Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 kali. Masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama dilaksanakan pada 1953-1955 atau juga lebih disebut dengan Kabinet Ali-Wongso. Ali Sastroamidjojo kembali menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya yaitu pada 1956 didasarkan pada Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum 1955.

Sejak Tahun 1950, banyak media pers partisipan dan independen yang muncul, disebabkan oleh kebebasan para wartawan untuk menerbitkan pers. Siapapun yang memiliki modal, tanpa memerlukan izin dari siapapun dapat menerbitkan media. Pers nasional Indonesia mendapatkan kebebasan dalam menyebarkan berita, dan pemerintah Indonesia memberikan bantuan modal, subsidi kertas koran dan alat-alat cetak (Suwarta, 2008). Pada surat kabar tersebut terdapat banyak kritik. Hal tersebut biasanya terdapat disampaikan pada dalam kolom Tajuk Rencana, Catatan Pojok, maupun Karikatur.

Pers Partisipan adalah pers yang terikat atau berafiliasi dengan suatu kekuatan politik, baik berafiliasi dengan partai, badan pemerintahan, suatu kelompok, dll. Pers ini menjamur tahun 1955 tepatnya menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum pertama di Indonesia, ada beberapa golongan Pers Partisipan yang bahkan sudah terbit sebelum tahun 1955. Pers Partisipan tersebut digunakan

sebagai salah satu cara untuk menarik minat dan simpati masyarakat agar memilih partai politik dan tokoh-tokoh yang bertarung saat itu untuk mendapatkan dan mewujudkan kekuasaan khususnya didalam tubuh DPR dan Konstituante.

Pers Partisipan yang dijadikan penelitian ini yaitu surat kabar milik Partai Nasional Indonesia yaitu surat kabar Suluh Indonesia. Berdiri pada tanggal 1 Oktober 1953 nama surat kabar ini diambil dari nama organ Partai Nasional Indonesia, yaitu Suluh Indonesia Muda. Surat kabar Suluh Indonesia ini terbit dari hari Senin sampai Sabtu, sementara pada hari Minggu surat kabar ini tidak terbit. Surat kabar ini memiliki slogan 'Untuk Kesatuan Rakyat dan Bangsa' yang selalu ditampilkan ketika terbit dibawah nama surat kabar Suluh Indonesia ini pada halaman awal. Sebagai surat kabar Partisipan dari Partai Nasional Indonesia, Suluh Indonesia selalu membela apapun yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia dan selalu mencela dan mengkritik apapun yang dilakukan oleh para lawan politiknya.

Selain Pers Partisipan, terdapat juga Pers Independen pada dekade ini, penerbitan dari Pers Independen adalah sebuah pers yang tidak terikat dengan suatu kekuatan politik manapun dan menerbitkan pemberitaan sesuai dengan arahan dan idealis pemimpin redaksinya. Surat kabar Indonesia Raya pertama kali terbit pada tanggal 29 Desember 1949, Awal pendirian surat kabar Indonesia Raya terdapat campur tangan pihak militer dalam surat kabar yang dipimpin oleh Mochtar Lubis ini. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara Mochtar Lubis dan Bachtiar Lubis yang tidak lain merupakan kakaknya sendiri. Bachtiar Lubis merupakan seseorang yang memiliki jabatan penting didalam militer dan mempunyai dukungan dari TNI terutama Divisi Siliwangi (Hill, 2011). Namun, keterlibatan pihak militer tidak banyak mempengaruhi surat kabar ini untuk berpihak pada suatu kekuatan dan golongan politik karena dalam terbitan ini tergabung wartawan-wartawan yang memiliki

pendirian merdeka dan menghindarkan diri dari pemberitaan politik yang berat sebelah, menguntungkan salah satu golongan dan merugikan golongan lain.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang tereksposnya kajian pandangan dan pemberitaan dari surat kabar atau pers khususnya pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Demokrasi Liberal merupakan salah satu peristiwa atau periode waktu dalam sejarah yang terjadi di Indonesia banyak dikaji oleh para sejarawan maupun sarjana dari rumpun ilmu lainnya. Karya sejarah yang mengkaji periode penting di Indonesia ini sering kali terbentur pada beberapa topik saja, seperti kajian peristiwa, tokoh berpengaruh, kebijakan politik.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kebijakan masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II,
2. Mengidentifikasi pemberitaan surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya terhadap kebijakan masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II,
3. Menganalisis perbandingan Pemberitaan (*News*) dan Pandangan (*Views*) surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya terhadap kebijakan masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan penelitian Sejarah Demokrasi Liberal di Indonesia khususnya mengenai surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya,
2. Memperkaya khazanah mengenai Peranan dan Pandangan Pers di Indonesia khususnya pada masa Demokrasi Liberal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau metode historis sebagai dasar acuan penulis dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Metode Historis merupakan suatu jalan, cara,

prosedur bagaimana mengetahui Sejarah (Sjamsuddin, 2007, hlm. 17). Lebih lanjut dijelaskan mengenai metode Historis dalam Ismaun (2005, hlm. 34) yang menyatakan bahwa metode historis ialah rekonstruksi imajinatif mengenai gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Metode sejarah terdiri atas empat tahapan penelitian, yakni:

1. Heuristik

Pada tahapan ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber dan bukti-bukti yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Proses pencarian sumber ini merupakan suatu langkah awal dalam melakukan penelitian. Langkah ini disebut dengan Heuristik. Sjamsuddin (2012, hlm. 67) menyatakan Sebagai langkah awal ialah apa yang disebut dengan Heuristik (*Heuristics*) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Upaya yang penulis lakukan pada tahap ini ialah dengan mengunjungi beberapa perpustakaan yang ada di Bandung, seperti Kineruku, Perpustakaan UPI, Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan Bapusipda dan perpustakaan yang ada di Jakarta, seperti Perpustakaan Nasional. Selain itu, penulis juga banyak mendapatkan sumber berupa buku elektronik dari Internet.

2. Kritik Sumber

Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan kritik sumber. Daliman (2012, hlm. 64) menyatakan bahwa setelah dilaksanakannya pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam bentuk dokumen-dokumen, maka yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah kritik (Verifikasi) sumber. Pada dasarnya pengumpulan data atau sumber-sumber dan Verifikasi merupakan langkah yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat dua jenis kritik yang ada dalam metode historis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

Penulis menilai bagaimana pokok pikiran atau inti yang terdapat dalam buku tersebut dan sudut pandang sang penulis pada masalah yang sedang dikaji. Proses ini akan menghasilkan data yang terseleksi dan dikaji secara kritis agar dapat menghasilkan suatu analisis yang baik.

3. Interpretasi

Tahap ketiga dalam penelitian yang menggunakan metode sejarah adalah interpretasi. Tahap ini mengharuskan seorang peneliti untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah didapat setelah melewati proses kritik atau verifikasi. Setelah itu, fakta-fakta tersebut dirangkai satu persatu sehingga membentuk suatu gambaran cerita atau kesatuan peristiwa yang sesuai dengan apa yang penulis maksudkan dalam penelitian ini. Terlepas dari kenyataan bahwa subyektivitas seorang sejarawan akan selalu ada dalam suatu tulisan sejarah, penulis berusaha untuk tetap menyajikan hasil penelitian ini dalam kondisi yang objektif dan tentunya rasional agar dapat mendekati kebenaran.

4. Historiografi

Menyajikan hasil penelitian merupakan tahap akhir dari penelitian. Pada tahap ini penulis merumuskan seluruh hasil penelitian ke dalam suatu bentuk tulisan yang utuh. Sjamsuddin (2007, hlm. 156) menjelaskan bagaimana seorang penulis atau sejarawan merangkai hasil penelitiannya. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penelitian utuh yang disebut historiografi. Penulisan sejarah disusun secara logis menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini mencanangkan program kerja yang cukup luas dan berani, sekaligus dapat dicatat sebagai program kerja kabinet hasil pemilu pertama. Sebagai Ali mempunyai keyakinan bahwa kabinetnya yang kedua ini akan sukses. PNI, Masyumi dan NU diharapkan dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan. Demikianlah sebuah kabinet yang sudah dibentuk oleh Ali dimana PNI adalah satu kepemimpinan dengan Masyumi dan NU yang keduanya sedikit banyak memberi pengaruh pada PNI. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Ali dapat mengatasi perbedaan-perbedaan paham ini, sehingga persetujuan tentang susunan kabinet baru dapat disetujui. Susunan kabinet Ali Sastroamidjojo II tersebut mendapatkan dukungan yang cukup besar dari DPR dan rakyat Indonesia. Namun karena belum berhasilnya membentuk UUD Republik Indonesia yang baru, maka cara kerja dan mekanisme hubungan pemerintah dan DPR masih berlandaskan Undang-Undang Dasar Serikat. Ali Sastroamidjojo mencanangkan program kerja dijabatannya yang kedua diantaranya adalah pembatalan perjanjian KMB, perjuangan pembebasan Irian Barat, Menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Suluh Indonesia: Organ Media Partai Nasional Indonesia

Keterlibatan pers yang memihak didalam suatu kekuatan politik atau yang disebut dengan Pers Partisipan sudah ada sejak tahun 1955. Pers Partisipan tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk menarik minat dan simpati masyarakat agar memilih partai politik dan tokoh-tokoh yang bertarung saat itu untuk mendapatkan dan mewujudkan kekuasaan khususnya didalam tubuh DPR dan Konstituante.

Menjamurnya Pers menjelang Pemilihan Umum 1955 diakibatkan oleh kebebasan para wartawan untuk menerbitkan pers. Boleh dikatakan bahwa siapapun yang memiliki modal, berupa uang, tidak peduli berasal dari golongan manapun atau menganut aliran dan ideologi politik apapun, dengan tanpa memerlukan izin dari siapapun dapat menerbitkan pers, khususnya surat kabar. Sehingga pers nasional Indonesia disini mulai mendapatkan kebebasan dalam menyebarkan berita, bahkan pada masa ini pemerintah Indonesia pun memberikan bantuan modal, subsidi kertas koran dan alat-alat cetak (Suwarta, 2008). Adanya surat kabar partai atau surat kabar partisipan tidak jarang memicu timbulnya polemik antar kelompok. Pada umumnya surat kabar partai memperoleh modal dan subsidi dana dari partai atau orang-orang tertentu yang aktif dalam partai politik yang menguasai surat kabar tersebut. Itulah sebabnya pers partai dapat lebih leluasa menyuarakan kepentingan partai dibanding memperhatikan kepentingan khalayak pembaca.

Pers Partisipan yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah organ media milik Partai Nasional Indonesia yaitu surat kabar Suluh Indonesia. Awal mula surat kabar ini berdiri menjelang Pemilihan Umum 1955, partai-partai politik mulai bersiap terutama dalam melakukan agitasi-propaganda. Hampir semua partai besar di masa itu telah memiliki surat kabar yang mendukung.

Hanya Partai Nasional Indonesia yang belum memiliki media resmi, harian Merdeka yang dipimpin oleh B.M. Diah merupakan satu-satunya media yang mewakili pandangan dari PNI dan juga sebagai simpatisan Partai Nasional Indonesia, namun kebijakan redaksionalnya tidak harus selalu sejalan dengan garis Partai Nasional Indonesia. Sehingga tanggal 1 Oktober 1953 muncu media khusus pemberitaan PNI dan diberi nama Suluh Indonesia atau biasa disingkat Sulindo. Nama Mohammad Tabrani merupakan pendiri dari surat kabar ini dan Redaktur Sayuti Melik,

kemudian digantikan oleh Manai Sophian pada pertengahan Desember 1953 (Rocamora, 1991). Surat kabar Suluh Indonesia ini terbit dari hari Senin sampai Sabtu, sementara pada hari Minggu surat kabar ini tidak terbit. Surat kabar ini memiliki slogan 'Untuk Kesatuan Rakyat dan Bangsa' yang selalu ditampilkan ketika terbit dibawah nama surat kabar Suluh Indonesia yang terpampang pada halaman pertama.

Sebagai surat kabar Partisipan dari Partai Nasional Indonesia, Suluh Indonesia selalu membela apapun yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia dan selalu mencela dan mengkritik apapun yang dilakukan oleh para lawan politiknya. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh Suluh Indonesia ini disebabkan bahwa Partai Nasional Indonesia merasa menjadi partai politik yang terkuat karena saingannya yaitu partai Masyumi telah mengalami perpecahan didalam internalnya dan kemudian terpecah.

Selain itu, faktor Presiden Soekarno simpatinya terhadap partai tersebut tidak dapat dirahasiakan di Partai Nasional Indonesia walaupun sudah bukan bagian dari PNI (Sunarto, 2005). Faktor-faktor tersebut yang membuat surat kabar Suluh Indonesia ini semakin berani menentang lawan politiknya dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menerbitkan pemberitaannya dan selalu berusaha untuk menjatuhkan para lawan politiknya.

Pemberitaan pertama dari surat kabar ini adalah mengenai Perjuangan Irian Barat untuk masuk kembali kepada wilayah Republik Indonesia. Surat kabar ini berpandangan bahwa jika Indonesia ingin mengembalikan Irian Barat kembali ke dalam wilayahnya maka hal tersebut harus didukung oleh rakyat Irian Barat sendiri. Irian Barat pada saat itu masih menjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia maka penjelasan dari hal tersebut yang diungkapkan dalam surat kabar ini adalah sebagai berikut.

Pada artikel yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1956 terpampang pada halaman 1 dengan menggunakan bahasa yang seakan

mengajak bahwa perjuangan yang dilakukan untuk memperjuangkan Irian Barat maka harus dikobarkan semangat perjuangan oleh para rakyat daerah Irian dan daerah di sekitarnya yang berada di wilayah Indonesia Timur. Kemudian para pemuda gabungan ini akan tetap memperjuangkan Irian Barat pada saat itu dan kedepannya hingga tujuan yang telah dicita-citakan bisa tercapai. Dijelaskan didalam pemberitaan bahwa organisasi bekas pejuang Maluku Utara yaitu Pemuda Banau mengumumkan ketika rapat bersama Silas Papare ketua dari Gerakan Aksi Bersama Pembebasan Irian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara telah mendapatkan kata sepakat untuk menyusun kerjasama dalam rangka Perjuangan Irian Barat pada waktu itu dan kedepannya. Dalam rapat tersebut telah dirumuskan pendapat bahwa satu-satunya jalan keberhasilan dalam mencapai perjuangan Irian Barat untuk kembali kedalam wilayah Republik Indonesia hanyalah perjuangan yang didukung oleh rakyat Irian Barat sendiri dan putera-putera daerah terutama para pemuda yang berdekatan dengan Irian Barat. Tindakan kabinet Ali Sastroamidjojo II untuk memperjuangkan Irian Barat secara penuh, sudah pasti akan membawa Republik Indonesia kearah yang baik. Semuanya itu akan mengembalikan Indonesia pada jiwa Proklamasi 1945. Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan tekad, niat dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, dan ini tentu saja harus dapat dukungan dari rakyat Indonesia seutuhnya, agar cita-cita perjuangan Irian Barat bisa tercapai. Percuma jika perjuangan yang telah diidamkan untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka hanya didukung satu pihak saja. Butuh dukungan lebih dan persatuan untuk mewujudkan suatu negara yang bebas merdeka. Selanjutnya, imbas dari Perjuangan dalam mengembalikan daerah Irian Barat maka pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan perjanjian pembatalan KMB, karena pada saat itu daerah Irian Barat ini masih berada dibawah kekuasaan pemerintah Belanda namun

tidak ada persetujuan dari pihak Indonesia. Pada masa pemerintahan kabinet ini telah terjadi penandatanganan Undang-Undang Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 (Poesponegoro & Notosusanto, 2010). Namun penandatanganan ini menimbulkan persoalan salah satunya tentang nasib dari pemodal Belanda yang ada di Indonesia. Timbul anjuran untuk segera nasionalisasi atau Indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang menjual perusahaannya, namun hal ini ternyata ditentang oleh sebagian besar anggota kabinet karena hal ini memicu Belanda menjual perusahaannya kepada orang-orang Cina karena pada umumnya orang-orang Cina dianggap sebagai orang yang ber-uang atau memiliki biaya untuk membeli perusahaan Belanda tersebut.

Pemberitaan selanjutnya yaitu mengenai pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah-daerah ketika masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo II. Tantangan daerah terhadap pemerintahan pusat dimulai pada awal 1956 dengan dilanggarnya peraturan impor dan ekspor oleh para pemimpin sipil dan militer di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Di kedua daerah ini Panglima Daerah Militer setempat bekerja sama secara erat dengan kepentingan bisnis lokal untuk menyelundupkan sejumlah besar produk ekspor dan sebaliknya membeli barang-barang impor dengan prosedur yang sama. Kegiatan penyelundupan ini sangat didukung oleh kebanyakan kelompok politik setempat yang merasa bahwa pada masa yang lalu sebagian besar keuntungan ekspor masuk ke kantong para pejabat yang berada di Jakarta (Rocamora, 1991). Walaupun sebenarnya banyak terjadi pemberontakan di daerah-daerah ketika masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo II namun penulis hanya menemukan pemberitaan dari surat kabar ini yaitu pemberontakan DI/TII yang ada di Aceh, surat kabar terbitan 4 September 1956 memberitakan bahwa kaki-tangan DI/TII pimpinan Daud Beureuh ditangkap dan telah menyelundupkan berbagai komoditas

dan mengakibatkan Indonesia merugi. Hal ini jelas sangat mencoreng program kerja dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II dalam rangka mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi stabil. Pemberitaan ini seakan membela pemerintah bahwa belum bisa dilakukannya program kerja stabilitas ekonomi diakibatkan oleh para penyelundup ini dan bukan salah sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kemudian pemberitaan yang diterbitkan pun menggunakan kalimat yang sangat kasar, kelompok DI/TII dalam surat kabar ini disebut dengan gerombolan, seakan-akan mereka adalah pemberontak yang akan menentang pemerintah pusat dan ingin menjatuhkan pemerintahan pusat.

Indonesia Raya : Surat Kabar Independen Pimpinan Sang “Wartawan Jihad”

Nama Indonesia Raya identik dengan seorang tokoh yang bernama Mochtar Lubis karena beliau merupakan sosok yang berperan penting dibalik layar dalam mengembangkan surat kabar ini secara pesat. Nama Indonesia Raya diusulkan oleh Teuku Sjahril ketika Mochtar Lubis mempunyai gagasan untuk menerbitkan surat kabar ini. Nama tersebut diusulkan karena dianggap sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia senada dengan judul lagu kebangsaan dari Indonesia sendiri yaitu Indonesia Raya (Atmakusumah, 1992). Lahirnya surat kabar ini pada tahun 1949 menunjukkan bahwa surat kabar ini memperjuangkan semangat kebebasan pers dengan maksimal tanpa adanya belenggu oleh berbagai kepentingan para penguasa, meskipun pada akhirnya surat kabar ini harus merasakan pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah akibat menyajikan pemberitaan yang kritis dan lugas.

Surat kabar Indonesia Raya pertama kali terbit pada tanggal 29 Desember 1949, Awal pendirian surat kabar Indonesia Raya terdapat campur tangan pihak militer dalam surat kabar yang dipimpin oleh Mochtar Lubis ini. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara Mochtar Lubis dan Bachtiar Lubis yang tidak lain merupakan kakaknya sendiri. Bachtiar Lubis

merupakan seseorang yang memiliki jabatan penting didalam militer dan mempunyai dukungan dari TNI terutama Divisi Siliwangi (Hill, 2011). Namun, keterlibatan pihak militer tidak banyak mempengaruhi surat kabar ini untuk berpihak pada suatu kekuatan dan golongan politik karena dalam terbitan ini tergabung wartawan-wartawan yang memiliki pendirian merdeka dan menghindarkan diri dari pemberitaan politik yang berat sebelah, menguntungkan salah satu golongan dan merugikan golongan lain.

Pemberitaan dari surat kabar ini yaitu pemberitaan mengenai Pembatalan KMB dari Indonesia Raya dan ditulis pada Tajuk Rencana surat kabar tersebut, surat kabar ini membandingkan pemerintah Indonesia khususnya dengan pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser yang sama-sama ingin menasionalisasi daerah dari negara jajahan. Mesir ingin menasionalisasi Terusan Suez yang hendak dikuasai oleh Inggris. Begitupun Indonesia yang ingin menasionalisasi wilayahnya dari tangan Belanda. Surat kabar ini pun berpendapat bahwa jika seandainya sejak masa kabinet Burhanuddin Harahap atau setelah kabinet Ali Sastroamidjojo II terbentuk langsung mengurus mengenai pembatalan KMB maka urusan Belanda mungkin pada saat itu telah selesai, terkecuali permasalahan mengenai Irian Barat.

Pemberitaan selanjutnya yaitu mengenai perjuangan terhadap wilayah Irian Barat. Dalam surat kabar ini menerbitkan headline mengenai RUU pembentukan Irian Barat mulai dibicarakan. DPR telah melakukan sidang pleno dan mulai melakukan pandangan umum terhadap RUU pembentukan provinsi Irian Barat. Sidang ini dihadiri oleh para pembicara yang berasal dari partai-partai anggota parlemen yang terdiri dari PNI, Masyumi, PSII, Partai Katolik, dll. semua yang pembicara menyetujui mengenai pembentukan provinsi Irian Barat, tetapi ada beberapa pembicara yang merasa amat kecewa karena hingga diadakannya rapat tersebut belum ada

wakil yang berasal dari daerah Irian Barat sendiri yang seharusnya ikut pula dalam membicarakan RUU pembentukan provinsi Irian Barat.

Setelah melakukan pembicaraan, maka bersamaan dengan diterimanya RUU pembentukan provinsi Irian Barat maka pemerintah harus bersedia untuk mendahulukan pembangunan-pembangunan di daerah Timur tepatnya di daerah Ternate dan Bacan. Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan tekad, niat dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, dan ini tentu saja harus dapat dukungan dari rakyat Indonesia seutuhnya, agar cita-cita perjuangan Irian Barat bisa tercapai.

Pemberitaan selanjutnya dari surat kabar ini mengenai pergolakan yang terjadi di daerah ketika masa pemerintahan kabinet ini, khususnya di daerah Sumatera. Diawali oleh pemberitaan yang diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Indonesia, yaitu Burhanuddin Harahap lalu diberitakan oleh surat kabar ini. Pemberitaan tersebut memuat bahwa daerah Sumatera sudah tidak percaya lagi kepada kabinet Ali Sastroamidjojo II ini. Kekacauan yang terjadi merupakan suatu bentuk kekecewaan dan merata di segala lapisan.

Pemerintah harus segera mengambil sebuah keputusan yang sebijaksana mungkin karena jika pengambilan keputusan dilakukan dengan tidak adil dan jujur maka akan timbul chaos, akan terjadilah pertentangan-pertentangan antara aparat negara TNI dengan sesama Perwiranya, antara suku dengan suku, dan lainnya.

Surat kabar ini pun mempertanyakan apakah bisa Kabinet Ali Sastroamidjojo mengatasi semua kekacauan yang terjadi tersebut. Yang jelas surat kabar ini pun membantah pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh PNI kabinet ini akan semakin kuat tapi pada nyatanya Sumatera telah melakukan mosi tidak percaya terhadap kabinet ini.

Perbandingan Pemberitaan (News) dan Pandangan (Views) Surat Kabar Suluh Indonesia dan Surat Kabar Indonesia Raya Terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Pada dasarnya pers memiliki suatu kebebasan yang dijamin dalam undang-undang pokok pers. Kebebasan pers dalam pelaksanaannya sangat terkait pada fungsi dan peranan pers. (Kuniawati, 1997). Kedua hal ini jelas menunjukkan sebuah keterkaitan. Adapun bentuk dari kebebasan pers tersebut dalam Undang-Undang Pers Nomor 11 Tahun 1996 yang tercantum dalam Simorangkir (1986, hlm. 37) yaitu sebagai berikut.

Pasal 3, pers mempunyai hak kontrol, kritik, dan korektif terhadap yang bersifat konstruktif.

Pasal 4, terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.

Pasal 5, ayat (1), kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara Indonesia dijamin.

Ayat (2), kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini.

Maka dengan jelas adanya pers ini ditujukan untuk melakukan kritik terhadap masyarakat ataupun pemerintah menyikapi berbagai macam suatu peristiwa, kebijakan dan lainnya bisa dilakukan serta dijamin dan dilindungi dalam suatu undang-undang, oleh karena itu setiap media massa yang berbentuk surat kabar maupun bentuk lainnya dituntut untuk berfikir kritis dan sebagai penanda untuk melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan bangsa dengan cara menjalankan sebagaimana fungsi pers itu sendiri. Namun, pers yang berkembang pada masa Demokrasi Liberal hal mengenai kebebasan pers disalah artikan dalam melancarkan fungsinya.

Topik pertama mengenai Pembebasan Irian Barat, surat kabar Suluh Indonesia berpandangan bahwa dalam mencapai tujuan untuk membebaskan Irian Barat maka diperlukan peranan dari warga terutama

pada pemuda Irian Barat serta didukung pula oleh para masyarakat Indonesia diharapkan bahwa dengan adanya perjuangan yang dilakukan oleh seluruh warga Indonesia dapat memaknai sila ke 3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sedangkan surat kabar Indonesia Raya berpandangan dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat sebenarnya pemerintah sudah mengambil tindakan yang dinilai menjadi tonggak untuk memperjuangkan Irian Barat bisa kembali ke wilayah Republik Indonesia dengan cara membuat Rancangan Undang-Undang Pembebasan Irian Barat, namun sangat disayangkan pembentukan RUU ini tidak melibatkan masyarakat dari Irian Barat sendiri. Pembentukan RUU ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan beberapa partai pendukung. Hal ini tidak sesuai dengan wacana pemerintah yang ingin mengajak masyarakat Irian Barat secara bersama-sama untuk memperjuangkan Irian Barat. Kemudian hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat selain merancang RUU, dilakukan juga pembangunan di daerah Irian Barat, agar pembangunan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah dapat terasa oleh warga Irian Barat sendiri. Sehingga masyarakat dari Irian Barat bisa memiliki rasa dirangkul dan diperhatikan oleh pemerintah dan memiliki rasa bahwa diakui dan mengakui negara Indonesia

Kedua, mengenai Pembatalan Perjanjian KMB memiliki pandangan bahwa jika dilakukan pembayaran terhadap hutang-hutang yang tercantum didalam Perjanjian KMB itu berarti Indonesia telah mempermalukan dirinya sendiri, maka langkah yang dianggap tepat oleh pemerintah yaitu dengan tegas tidak akan membayarkan hutang yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Namun, hanya hutang kepada Belanda saja yang tidak dibayarkan, hutang kepada pihak ketiga akan tetap dibayar sebagaimana mestinya. Perilaku inilah yang kemudian membuat Belanda marah terhadap pemerintahan Indonesia. Belanda mengecam langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengutus perwakilan

Menteri Luar Negeri Belanda. Indonesia diharuskan tetap membayar, Belanda tidak bisa menerima jika Indonesia membatalkan Perjanjian KMB ini secara sepihak dan tanpa disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam surat kabar Indonesia Raya berpandangan bahwa pembatalan KMB yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkesan ragu-ragu dan tidak ada keberanian menolak dengan tegas pembatalan perjanjian tersebut. ketidaktegasan dari pemerintah Indonesia terlihat dari sikap yang dilakukan terhadap Belanda. surat kabar ini cenderung mengkritik dan membandingkan jika pemerintah Indonesia alangkah lebih baiknya pemerintah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Mesir. Pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Gammal Abdul Nasser dengan tegas menolak kehadiran Inggris dan menasionalisasi Terusan Suez dari Inggris. Suatu hal yang berbeda dengan Indonesia yang masih berdiplomasi dan menerima utusan dari Menteri Luar Negeri Belanda.

Ketiga mengenai konflik di daerah, surat kabar Suluh Indonesia memandang bahwa konflik yang terjadi di daerah merupakan suatu usaha pemberontakan dan juga harus segera dituntaskan agar selaras dengan program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu pemulihan keamanan dan stabilitas negara. Pemulihan keamanan pun dilakukan dengan cara menangkap dan mengamankan salah satu yang diduga berasal dari kelompok DI/TII di Aceh. Seorang yang ditangkap tersebut merupakan keturunan Tionghoa yang melakukan penyelundupan bahan makanan dan rempah-rempah ke Malaysia, namun pembayaran yang dilakukan bukan dengan uang melainkan dengan senjata kepada kaki-tangan DI/TII dan ditujukan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia dan mewujudkan berdirinya Aceh menjadi sebuah negara Islam dan dapat memisahkan diri dari negara Indonesia. Sedangkan dalam surat kabar Indonesia Raya memiliki pandangan bahwa pergolakan yang terjadi di daerah merupakan buntut dari kebijakan pemerintah

yang dianggap tidak adil bagi warga daerah terutama warga Sumatera. Surat kabar ini cenderung membela pergolakan yang terjadi hal ini dianggap sebagai suatu protes dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap menerbitkan suatu kebijakan yang tidak menguntungkan. Contohnya pemerintah memberlakukan larangan kegiatan ekspor dan impor padahal di daerah Sumatera ekspor dan impor ini menjadi kunci perekonomian untuk tetap bisa menjalani kehidupan. Selain itu, surat kabar ini pun mempunyai faktor lain yaitu para pegawai redaksi sebagian berasal dari Sumatera sehingga berita yang diterbitkan pun sudut pandang orang Sumaterasentris sehingga surat kabar ini terkesan berat sebelah dan membela suatu pihak, bukan menerbitkan pemberitaan yang objektif.

Ditinjau dari pemberitaan yang diterbitkan oleh surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya dalam memandang kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki sudut pandangnya masing-masing. Dapat dibuktikan bahwa pemberitaan pada Surat kabar Suluh Indonesia dinilai sejalan program kerja kabinet Ali memberitakan perilaku masyarakat yang menolak keberadaan pemerintah pusat akan dianggap sebagai pemberontak. Sehingga peran pers disini terkesan tidak netral, tidak menjunjung tinggi norma pers dan dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan golongan. Sedangkan Pemberitaan surat kabar Indonesia Raya dinilai lebih netral dan lebih banyak memberitakan tentang kondisi faktual dari negara Indonesia sendiri lebih menjunjung nasionalisme dan juga mempertahankan keutuhan NKRI dengan memperjuangkan keputusan pers yang bebas, netral dan lebih adil untuk semua pihak. Terlepas dari hal tersebut surat kabar Indonesia Raya lebih sering menerbitkan pemberitaan yang bersifat mengkritik pemerintahan jika kebijakan yang dikeluarkan dianggap tidak sejalan dengan idealisme dari pemimpin redaksi surat kabar ini.

SIMPULAN

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia, pers merupakan suatu media yang sangat penting bagi para masyarakat untuk mengetahui kabar mengenai kondisi Indonesia, pers yang populer pada masa tersebut yaitu dalam bentuk surat kabar. Pers sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama, Pers Partisipan merupakan sebuah pers yang berafiliasi dengan suatu kekuatan politik dengan kata lain menjadi sebuah organ dalam pemberitaan yang menjunjung salah satu partai politik. Dengan beragam latar belakang yang dimiliki oleh jenis-jenis pers tersebut pasti setiap pers pada masa Demokrasi Liberal memiliki karakteristik pemberitaan dan kepentingan yang beragam pula.

Setiap program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II tak lepas mendapatkan perhatian dari masyarakat, pers dan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji pandangan dari pihak pers terhadap kebijakan tersebut, pers yang dikaji pun difokuskan terhadap surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya.

Pemberitaan dari surat kabar Suluh Indonesia yaitu pertama mengenai Perjuangan Irian Barat, pemberitaan dari surat kabar ini dinilai lebih banyak memuat unsur berita yang berdasarkan fakta dan realita namun terkesan lebih mendukung satu elemen dalam memberitakan kejadian., Surat kabar Suluh Indonesia berpandangan lebih menitikberatkan pada peran rakyat Indonesia dan pemuda dalam mengembalikan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Walaupun beberapa daerah yang dengan dengan Irian Barat sudah berkoalisi dan mendukung pembebasan Irian Barat, namun peran masyarakat diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mengembalikan Irian Barat menjadi bagian dari negara Indonesia. Sedangkan pandangan Pembebasan Irian Barat dalam surat kabar Indonesia Raya dinilai lebih proaktif dan menjelaskan kondisi sebenarnya

dimana pembuatan RUU pembebasan Irian Barat sudah direncanakan namun dalam pelaksanaannya hanya mengandalkan orang-orang dalam pemerintahan saja bukan melibatkan warga asli dari Irian Barat yang menyebabkan kecaman dari beberapa pihak dan pada akhirnya masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih mengutamakan pembangunan di daerah timur terutama di daerah Irian Barat.

Kebijakan selanjutnya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu mengenai Pembatalan Perjanjian KMB. Surat kabar Suluh Indonesia berpandangan bahwa seakan-akan pemerintah Indonesia menyatakan dengan tegas tidak akan membayar hutangnya terhadap Belanda, namun pada kenyataannya pemerintah Indonesia dalam membatalkan perjanjian KMB tidak dilakukan secara tegas dan berlangsung secara berlarut-larut dan alot. Selain itu surat kabar ini terlihat sangat mengagungkan dan membela keberhasilan kabinet Ali Sastroamidjojo II ini dalam membatalkan perjanjian KMB dan membuat Belanda geram atas sikap Indonesia yang melanggar aturan dan perjanjian yang dilakukan kepada pihak Belanda. Sedangkan pemberitaan dari surat kabar Indonesia Raya pandangan yang dimuat dalam artikel terkesan lebih berani karena artikel Pembatalan KMB dinilai berani dalam mengkritik pemerintahan karena pemerintah pusat masih bersifat ragu-ragu dalam memperjuangkan nasionalisasi Indonesia. Hal itu karena negara Indonesia masih belum matang dalam mengambil keputusan seperti pemerintah Mesir yang menasionalisasi bangsa dari pemerintah Inggris dengan cara yang tegas dan berani. Sehingga dalam surat kabar tersebut pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih tegas namun tetap santun dalam membatalkan perjanjian KMB dengan Belanda.

Kemudian program kerja terakhir dari kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terakhir mengenai memulihkan keamanan daerah Indonesia dengan mengatasi pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah. Pandangan

dari surat kabar Suluh Indonesia yaitu bahwa konflik yang terjadi di daerah disebabkan adanya pelarangan dari pemerintah dalam ekspor impor barang ke negara lain dari daerah dan harus terpusat. Sehingga masyarakat pun menolak dan mengancam pelarangan tersebut hingga ditemukannya seorang keturunan Tionghoa yang merupakan anak buah DI/TII di Aceh dan ditemukan banyak sekali penyelundupan bahan hasil alam untuk dijual ke negara asing dan dana yang dihasilkan digunakan untuk membeli persenjataan dan juga adanya pertentangan dari pihak ulama dan melakukan pemberontakan dari pihak Aceh yang ingin mendirikan negara Islam dan memisahkan diri dari negara Indonesia. Sedangkan dari pandangan surat kabar Indonesia Raya terjadi pergolakan di daerah Sumatera karena adanya kekecewaan dari warga Sumatera karena keputusan terpusat di pemerintah bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga kekecewaan Dewan Banteng terhadap pemerintah pusat menyebabkan adanya pernyataan bahwa rakyat Sumatera mosi terhadap pemerintah pusat. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kebebasan dan pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi dan juga pendapat rakyat melainkan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah sehingga terjadi banyak sekali penolakan.

Bila dibandingkan antara pandangan pada surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya terhadap program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo II, perbedaan pandangan terjadi pada dua surat kabar tersebut. Dapat dilihat dan dibuktikan bahwa pemberitaan di Surat kabar Suluh Indonesia tergolong juga terkesan membanggakan kabinet Ali Sastroamidjojo II dan pro terhadap pemerintahan pusat. Sedangkan surat kabar Indonesia Raya dinilai lebih netral dan lebih banyak memberitakan tentang kondisi faktual dari negara Indonesia sendiri, lebih menjunjung nasionalisme dan juga mempertahankan keutuhan NKRI dengan memperjuangkan keputusan pers yang bebas, netral dan lebih adil untuk semua pihak.

REFERENSI

- Atmakusumah, A. (1992). *Mochtar lubis wartawan jihad*. Harian Kompas.
- Daliman. A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Hill, D. T. (2011), *Jurnalisme dan politik indonesia: biografi kritis mochtar lubis (1922-2004) sebagai pimpinan redaksi dan pengarang*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ism aun. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuniawati. (1997). "Tempo di Balik Pembredelan Pembredelan Pers 1971-1982". (*Skripsi sarjana tidak diterbitkan*). Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Depok.
- Poesponegoro, M.D & Notosusanto, N. (2010) *Sejarah nasional indonesia jilid vi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rocamora, J. E. (1991). *Nasionalisme mencari ideologi bangkit dan runtuhnya pni*. Pustaka Utama Grafiti.
- Simorangkir, J.T.C. (1986). *Pers, siuup dan wartawan*. Gunung Agung.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sunarto, P. (2005), "Metafora visual kartun editorial di surat kabar jakarta 1950-1957". (*Disertasi doctoral tidak diterbitkan*). Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Suwirta, A. (2008). Dinamika kehidupan pers di indonesia pada tahun 1950-1965 : antara kebebasan dan tanggung jawab nasional. *Sosiohumanika*, 1(2).
- Thoha, M. (2005). *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.

Artikel Surat Kabar

- "Perjuangan Irian Barat Harus Didukung Pemuda Irian" dalam surat kabar Suluh Indonesia, hlm. 1. Jakarta: 15 Februari 1956.
- "Indonesia Tidak Akan Bajar Lagi Hutang-Hutangnja (KMB) pada Belanda" dalam surat kabar Suluh Indonesia, hlm. 1. Jakarta: 6 Agustus 1956.
- "Belanda Marah-Marah Karena Hutang Padanja Tak Dibajar" dalam surat kabar Suluh Indonesia, hlm. 1. Jakarta: 13 Agustus 1956.
- "Kaki-tangan DI/TII (Daud Beureuh) Ditangkap" dalam surat kabar Suluh Indonesia, hlm. 1. Jakarta: 4 September 1956.
- "Indonesia dan Mesir" dalam surat kabar Indonesia Raya, hlm. 3. Jakarta: 6 Agustus 1956.
- "Pembentukan Irian Barat Mulai Dibicarakan" dalam surat kabar Indonesia Raya, hlm. 1. Jakarta: 9 Agustus 1956.
- "Sumatera Tidak Percaya Lagi Pada Kabinet" dalam surat kabar Indonesia Raya, hlm. 3. Jakarta: 16 Januari 1957.